

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan Agustus 2025, isu pendapatan dan tunjangan anggota DPR mulai mendapat perhatian publik setelah beredar kabar tentang tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan. Pada awalnya, diskusi di ruang daring memunculkan beragam pertanyaan terkait rincian gaji dan tunjangan anggota DPR, yang mendorong pimpinan serta anggota dewan memberikan penjelasan terbuka mengenai struktur penghasilan mereka. Klarifikasi ini menegaskan adanya perbedaan antara gaji pokok dan berbagai komponen tunjangan, namun kegaduhan belum sepenuhnya reda sampai muncul pemicu baru di pemberitaan (Rahmawati 2025b).

Gelombang viral terjadi pada 18–19 Agustus 2025, saat video anggota DPR berjoget di akhir Sidang Tahunan MPR menjadi pusat perhatian publik. Aksi joget tersebut direkam dan tersebar melalui berbagai kanal media sosial serta disorot oleh media arus utama, termasuk *detikNews* dan *20detik*. Tindakan sejumlah anggota dewan yang ikut bergoyang di tengah suasana sidang tahunan segera dikaitkan dengan isu tunjangan, memicu reaksi keras dari masyarakat atas dugaan ketidakpekaan terhadap situasi sosial dan kondisi ekonomi rakyat. Rangkaian pemberitaan yang muncul menyoroti respons awal dan sentimen warganet mulai dari kritik etika, sampai munculnya narasi normalisasi dengan alasan hiburan penutup acara sidang. Bahkan, beberapa anggota DPR seperti Adies Kadir dan Pasha menegaskan bahwa joget dilakukan setelah agenda inti untuk meramaikan suasana, bukan menunjukkan sikap meremehkan (Muliawati 2025b).

Kontroversi kemudian memasuki tahap eskalasi saat sentimen publik memuncak dan aksi unjuk rasa terjadi di depan Gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Demonstrasi yang berlangsung di tengah maraknya perbincangan mengenai tunjangan dan perilaku anggota dewan turut memperkuat tekanan masyarakat terhadap institusi legislatif. Kritik terhadap moralitas, transparansi, serta representasi wakil rakyat semakin meluas di berbagai platform berita dan media

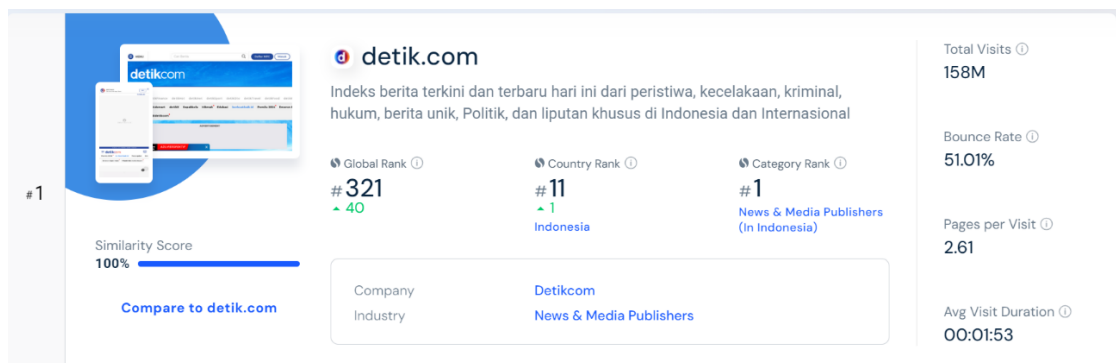
sosial. Berbagai media, khususnya *detik.com* dan kanal-kanal regionalnya, mengulas secara detail rangkaian tuntutan massa, klarifikasi resmi soal tunjangan, penjernihan narasi hoaks terkait persoalan joget gaji Rp3 juta/hari, dan upaya lembaga menjawab tekanan publik dengan paket kebijakan baru. Rentetan peristiwa ini menjadikan isu Joget DPR bukan sekadar polemik sesaat.

Dalam kajian komunikasi, framing dipahami sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Robert N. Entman menjelaskan bahwa framing bekerja melalui pemilihan beberapa aspek realitas yang dipersepsikan, kemudian aspek tersebut dibuat lebih menonjol dalam teks komunikasi sehingga dapat membentuk cara khalayak mendefinisikan masalah, memahami penyebab, memberikan penilaian moral, dan mempertimbangkan solusi atas suatu peristiwa (Prasetya 2023). Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk sudut pandang tertentu melalui pilihan fakta, narasumber, diksi, judul, kutipan, visual, dan susunan informasi.

Untuk menelaah bagaimana kerangka makna tersebut bekerja di dalam teks berita, penelitian ini menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman 1933. Dikutip dalam (Prasetya 2023), Etman menjelaskan bahwa pemberitaan merupakan sumber objek yang bisa diamati. Pada dasarnya, *framing* terhadap suatu pemberitaan merujuk pada definisi, penjelasan evaluasi, dan rekomendasi yang terdapat dalam suatu wacana. Merujuk juga pada Robert N. Etman, *framing* bekerja melalui empat fungsi yakni mendefinisikan masalah seperti apa yang dipandang sebagai isu utama, mendiagnosis penyebab siapa/apa yang dianggap sebagai sumber masalah, menilai secara moral pada nada evaluatif terhadap aktor/tindakan, dan menyarankan penanganan seperti solusi atau rekomendasi kebijakan. Keempat fungsi ini digunakan sebagai lensa untuk membaca bagaimana *detik.com* membingkai fenomena joget DPR dan isu tunjangan DPR. Dengan pisau bedah Entman, penelitian ini membaca bagaimana *detik.com* mendefinisikan kasus Joget DPR apakah sebagai ketidaksopanan institusional, atau spontanitas pasca-acara, mendiagnosis penyebab misalnya pada konteks musik perayaan, atau ketidakpekaan simbolik, memberi evaluasi moral pada nilai kepatutan forum

kenegaraan, dan menawarkan rekomendasi untuk klarifikasi, pemanggilan etik, pembatasan fasilitas.

Detik.com menjadi pilihan media yang sangat relevan untuk penelitian ini karena berdasarkan data Agustus 2025 dari *Similarweb*, *detik.com* menempati posisi pertama dalam kategori News & Media Publishers di Indonesia, serta memiliki skor kemiripan 100% dengan portal berita utama lainnya. Dengan total kunjungan mencapai 158 juta kali dalam satu bulan, *detik.com* membuktikan posisinya sebagai sumber informasi yang sangat sering diakses publik Indonesia, melampaui banyak situs berita nasional. Durasi rata-rata kunjungan pengguna selama hampir dua menit (01:53), dengan page per visit sebesar 2,61, menunjukkan tingkat engagement dan konsumsi berita yang tinggi dibanding rata-rata portal berita digital, sementara rasio bounce sebesar 51% masih cukup dalam rentang wajar untuk situs berita dengan trafik massal (*Similarweb* 2025).



Gambar 1. 1 Similarweb. (2025, August). *detik.com* ranking & analytics. Retrieved October 4, 2025

from <https://www.similarweb.com/website/detik.com/>

Keunggulan lainnya, *detik.com* juga menempati peringkat global #321 dan peringkat ke-11 situs paling banyak diakses di Indonesia, mempertegas daya jangkauan serta kredibilitasnya dalam penyebaran berita dan konstruksi informasi publik. Kapasitas *detik.com* sebagai media massa terbesar secara kunjungan serta cakupan isu sangat mendukung kebutuhan penelitian yang ingin mengevaluasi pola seleksi, penonjolan, dan dampak penyajian berita terhadap pembaca Indonesia. Data *Similarweb* ini menyediakan justifikasi kuat secara kuantitatif untuk memilih *detik.com* sebagai objek kajian, sebab analisisnya sangat representatif terhadap perilaku konsumsi informasi digital Indonesia di masa kini (*Similarweb* 2025).

Fokus penelitian diarahkan hanya pada kanal *detikNews*, tanpa mencakup kanal atau subkanal *detik.com* yang lain. Kriteria inklusi meliputi artikel *straight/hard news*, *live update*, atau berita lanjutan yang relevan dalam periode tersebut pada kanal *DetikNews*. Kriteria eksklusi meliputi seluruh tulisan opini dan kolom, seluruh advertorial dan konten bermerek, seluruh konten yang hanya memuat video tanpa naskah berita pada halaman artikel, seluruh artikel duplikat, serta artikel dari subkanal yang tidak tampil atau tidak memiliki tautan pada kanal *detikNews*.

Dengan demikian, keberadaan *detik.com* sebagai platform berita utama mampu membentuk dan mempengaruhi narasi publik secara luas. Jika dilihat dari sudut pandang metodologis, kerangka *framing* yang diterapkan di media ini memiliki pengaruh yang signifikan, mengingat skala audiens yang sangat besar dan karakteristiknya sebagai sumber utama informasi di Indonesia. Hal ini menjadikan analisis terhadap narasi dan *framing* yang disebarkan *detik.com* sangat penting, karena media ini berada dalam posisi strategis sebagai ruang utama pembentukan persepsi publik terkait isu-isu politik seperti polemik DPR ini.

Sebelum penelitian ini dilakukan, sejumlah studi telah menunjukkan adanya kecenderungan *framing* dalam pemberitaan *detik.com*. Salah satu penelitian terdahulu menemukan bahwa dalam isu migrasi siaran televisi analog ke digital, *detik.com* cenderung menonjolkan unsur kebaruan kebijakan serta lebih dominan mengutip otoritas pemerintah sebagai sumber informasi, sehingga bingkai yang terbentuk relatif aman dan menegaskan salience aktor resmi dalam konstruksi berita (Wisnutoomo dan Prasetyawati 2023). Dalam penelitian lain juga menunjukkan bahwa dalam isu keagamaan yang merujuk pemberitaan internasional, *detik.com* membingkai peristiwa melalui seleksi fakta, pilihan narasumber, dan penekanan argumen tertentu, sehingga tampak bagaimana otoritas dan konteks lintas-rujukan membentuk penonjolan aspek isu di ruang redaksi (Ardinza dan Prabowo 2024).

Menilik kumpulan studi terdahulu tentang pemberitaan parlemen dan etika politik di media daring Indonesia, fokus analitik umumnya tersegmentasi, sebagian mengupas dimensi etika simbolik dalam peristiwa seremonial kenegaraan, sebagian lain membedah wacana kebijakan kesejahteraan anggota legislatif. Belum dijumpai kajian yang secara serentak memetakan koeksistensi dua bingkai tersebut etik-

simbolik forum kenegaraan dan kebijakan tunjangan DPR dalam satu episode isu yang sama, serta menelusuri bagaimana penonjolan lintas elemen teks dan visual dapat membentuk makna pada *detik.com* selama 15 Agustus–10 September 2025. Celah inilah yang dituju oleh penelitian ini melalui lensa empat fungsi *framing* Robert N. Etman.

Dengan lensa tersebut, rangkaian pelipuran *detik.com* atas Joget DPR dan isu tunjangan memperlihatkan dinamika frame yang bisa dipetakan dengan model analisis *framing* Robert N. Etman. Pertama, *define problems*, yaitu sebagian paket berita mendefinisikan masalah sebagai ketidakpantasan simbolik yang dihubungkan publik dengan etika institusi, sementara yang lain mendefinisikannya sebagai kesalahpahaman konteks waktu *after-event*, atau bahkan apresiasi seni pengisi acara. Kedua, *diagnose causes*, di mana *detik.com* menonjolkan penjelasan pejabat yakni Adies Kadir yang mendiagnosis sebab sebagai spontanitas karena musik perayaan, bukan sikap resmi lembaga, dan pada isu tunjangan, diagnosis diarahkan pada ketiadaan fasilitas rumah dinas, sehingga tunjangan bersifat sementara dan akhirnya dihentikan. Ketiga, *make moral judgments*, di mana *detik.com* mengelola dua nilai yang bersaing yaitu nilai kepantasan forum dan nilai normalitas hiburan penutup, serta pemberitaan tentang pemanggilan etik MKD memperlihatkan standar moral institusi yang tetap bekerja menindaklanjuti laporan Masyarakat (Rahmawati 2025c). Keempat, *treatment recommendations*, di mana rekomendasi tersirat hadir sebagai klarifikasi kebijakan seperti pemberhentian tunjangan, moratorium kunjungan luar negeri, kanalisasi etik seperti mekanisme MKD, dan edukasi publik yakni penjelasan kronologi agar tidak disalahartikan (Muliawati, 2025a).

Untuk penentuan periode penelitian, peneliti melakukan penelusuran awal terhadap artikel DetikNews yang secara langsung membahas isu Joget DPR dan tunjangan DPR pada periode 15 Agustus sampai 10 September 2025. Penelusuran dilakukan terhadap artikel berita teks pada kanal DetikNews dengan memasukkan pemberitaan mengenai aksi Joget DPR, tunjangan rumah anggota DPR, evaluasi dan penghentian tunjangan, serta tindak lanjut etik yang berkaitan langsung dengan polemik tersebut, sedangkan artikel video, opini, advertorial, artikel pada kanal

regional, dan pemberitaan DPR yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan isu penelitian tidak dimasukkan dalam penghitungan. Tanggal 15 Agustus 2025 ditetapkan sebagai awal periode untuk menangkap konteks awal kemunculan isu tunjangan DPR di ruang publik sebelum berkembang menjadi polemik yang lebih luas, sedangkan tanggal 10 September 2025 dipilih sebagai batas akhir karena intensitas pemberitaan yang secara langsung membahas isu Joget DPR dan tunjangan DPR mulai mengalami penurunan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa terdapat 39 artikel DetikNews yang relevan selama periode penelitian, dengan distribusi pemberitaan harian sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Data jumlah artikel tentang isu pada periode penelitian 15 Agustus - 10 September 2025

Periode 15 Agustus–10 September 2025 dipilih karena rentang ini merekam fase eskalasi hingga peluruhan isu dimulai pada momentum pertengahan Agustus yang memicu lonjakan perhatian publik dan pemberitaan, serta diakhiri pada 10 September ketika intensitas liputan *detikNews* dan percakapan publik mulai menurun sehingga pola bingkai relatif stabil, menjadikannya *cut-off* alamiah bagi analisis.

Akhirnya, konstelasi peristiwa pada 15 Agustus–10 September 2025 mulai dari joget di forum kenegaraan, klarifikasi pimpinan, kanalisasi etik MKD, hingga penghentian tunjangan memberi laboratorium sosial yang ideal untuk membaca praktik *framing*. *Detik.com* menghadirkan rangkaian wacana yang bisa dianalisis

secara empiris dan sistematis mulai dari bagaimana masalah didefinisikan, sebab ditunjuk, nilai dinilai, dan solusi diarahkan. Oleh karena itu, penelitian ini secara sadar membatasi objek pada *detik.com* saja, dengan tujuan membahas detail *framing* atas fenomena joget DPR berikut isu tunjangan secara mendalam dan kontekstual.

Agar fokus pembahasan tetap terarah, penelitian ini dibatasi pada pemberitaan di kanal DetikNews pada situs *detik.com* dalam rentang waktu 15 Agustus hingga 10 September 2025. Unit analisis penelitian mencakup berita keras, pembaruan langsung, dan berita lanjutan yang berkaitan dengan isu Joget DPR dan isu tunjangan DPR. Analisis difokuskan pada unsur teks berita yang meliputi judul, lead, isi berita, dan kutipan narasumber, serta unsur visual statis berupa foto dan caption yang menyertai berita. Adapun unsur video tidak dijadikan unit analisis utama, melainkan hanya diposisikan sebagai konteks tambahan apabila relevan dalam memperkuat konstruksi makna berita.

Penelitian ini mendesak sebab *framing* media seperti *detik.com* tidak hanya menyampaikan fakta, melainkan juga membentuk cara kita sebagai masyarakat memahami isu-isu krusial seperti etika pejabat DPR apakah joget DPR itu sekadar hiburan atau pelanggaran simbolik yang memicu ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyat. Pembaca harus peduli dengan penelitian ini, mengingat kita semua bergantung pada berita digital untuk membentuk opini, dan tanpa analisis semacam ini, kita berisiko terjebak dalam narasi yang bias, yang justru bisa memperburuk polarisasi sosial di tengah kondisi ekonomi sulit seperti sekarang. Bayangkan jika penelitian ini tidak dilakukan, khalayak umum akan paling terdampak karena kehilangan alat untuk membaca berita secara kritis, sehingga opini publik tetap terpecah belah dan lembaga seperti DPR lolos dari pengawasan media yang lebih akuntabel, sementara jurnalis pun kehilangan kesempatan untuk merefleksikan praktik mereka. Sebaliknya, bila penelitian ini dilaksanakan, manfaatnya akan dirasakan secara luas, di mana masyarakat bisa memperoleh bekal literasi media untuk menilai berita lebih bijak, redaksi *detik.com* dan media lain berkesempatan mengevaluasi *framing* mereka agar lebih berimbang, serta DPR dan pembuat kebijakan mendapatkan masukan konkret untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi kita secara keseluruhan.

Berpijak pada celah dan urgensi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana *detik.com* mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberi penilaian moral, dan menyarankan penanganan terhadap fenomena “Joget DPR” beserta isu “tunjangan DPR”, serta memetakan strategi penonjolan (*salience*) pada elemen teks dan visual yang menyertai bingkai-bingkai tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pola dan pergeseran framing DetikNews terhadap isu Joget DPR dan tunjangan DPR pada periode 15 Agustus hingga 10 September 2025 berdasarkan model framing Robert N. Entman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan pergeseran framing *detikNews* atas fenomena Joget DPR dan isu tunjangan DPR pada 15 Agustus hingga 10 September 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori *framing* media, khususnya dalam konteks pemberitaan politik di Indonesia. Studi ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana media, dalam hal ini *detik.com*, membangun narasi dan mempengaruhi persepsi publik melalui analisis dengan empat elemen *framing* menurut Entman yakni *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgments*, dan *treatment recommendations*. Temuan penelitian juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam bidang komunikasi massa dan kajian media politik.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Penelitian ini bermanfaat bagi jurnalis dan media sebagai bahan evaluasi dalam praktik peliputan yang lebih transparan dan berimbang, terutama dalam pemberitaan isu-isu sensitif politik dan sosial seperti fenomena Joget DPR dan tunjangan DPR. Hasil penelitian dapat

membantu masyarakat dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana *framing* media membentuk opini publik, sehingga mendorong literasi media yang lebih kritis dan sadar terhadap konstruksi berita. Selain itu, hasil studi ini dapat menjadi masukan bagi lembaga legislatif dalam berkomunikasi dengan publik untuk memperbaiki citra dan transparansi.